



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

Tahun Sidang : 2024-2025

Masa Persidangan : III

Rapat ke : 19 (sembilan belas)

Jenis Rapat : Rapat Kerja

Dengan : Menteri Kesehatan RI

Sifat Rapat : Terbuka

Hari/tanggal : Rabu, 14 Mei 2025

Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Acara : 1. Perkembangan penyusunan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), termasuk sinkronisasi dengan RPJMN 2025–2029 dan perumusan prioritas transformasi sistem kesehatan nasional.
2. Evaluasi Pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Ketua Rapat : Felly Estelita Runtuwene, S.E./Ketua Komisi IX DPR RI

Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI

Hadir : A. Anggota DPR RI
32 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI
B. Pemerintah
- Menteri Kesehatan RI; Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC., CLU. beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dibuka pukul 13.36 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memastikan penyusunan RIBK 2025–2029 secara terukur dan berkelanjutan, dengan:
 - a. Segera mendorong penerbitan Peraturan Presiden tentang RIBK sesuai amanat Pasal 220 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan agar dikeluarkan selambat-lambatnya bulan Juni 2025;
 - b. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI untuk mendorong seluruh pemerintah daerah mencantumkan indikator kinerja RIBK dalam dokumen RPJMD dan Renstra SKPD sesuai amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - c. Menyusun strategi koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pencapaian 42 (empat puluh dua) indikator kinerja, khususnya terkait peningkatan cakupan imunisasi, penurunan angka kematian ibu, penurunan prevalensi stunting, penurunan prevalensi perokok, penurunan angka tuberkulosis, penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan *Universal Health Coverage* (UHC)-*Service Coverage Index* (SCI);
 - d. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyelesaikan kesenjangan pendanaan (*indicative gap*) melalui optimalisasi sumber APBN, APBD, dan kolaborasi sektor swasta melalui proses yang akuntabel dan transparan; dan
 - e. Melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan terkait secara bermakna (*meaningful participation*) dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program kesehatan, termasuk melalui forum komunitas, mekanisme umpan balik, dan advokasi berbasis bukti di tingkat lokal.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memperkuat pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) agar lebih luas, efisien, dan berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Memastikan pemenuhan alat kesehatan di puskesmas sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SDM Kesehatan sesuai jenis layanan guna mendukung pelaksanaan PKG secara optimal dan merata;
 - b. Meningkatkan cakupan PKG ulang tahun secara nasional guna mencapai sasaran RPJMN 2025;

- c. Memastikan kesiapan pelaksanaan PKG Sekolah yang akan dimulai Juli 2025, termasuk finalisasi juknis, infrastruktur kesehatan, dan integrasi pencatatan digital;
 - d. Memperkuat kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Kementerian Agama RI, dan Kementerian Dalam Negeri RI dalam sosialisasi dan pelaksanaan PKG Sekolah serta menjangkau anak di luar satuan pendidikan formal; dan
 - e. Menindaklanjuti temuan-temuan hasil PKG dengan tatalaksana lanjutan dan upaya rujukan medis antara lain untuk penyakit tidak menular (PTM) termasuk hipertensi, diabetes, obesitas sentral, dan gangguan kesehatan jiwa.
3. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mitra strategis dalam pelaksanaan PKG melalui penguatan edukasi dan literasi kesehatan masyarakat berbasis komunitas, pelibatan organisasi keagamaan, dan sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial secara optimal untuk kampanye promotif dan preventif.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.53 WIB.

Jakarta, 14 Mei 2025

MENTERI KESEHATAN RI,

KETUA RAPAT,

Ttd.

Ttd.

Ir. BUDI GUNADI SADIKIN, CHFC., CLU.

FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E
A-419